



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019



Alamat : Jl. Pulau Belitung No. 2 Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan - Pangkalpinang
Telp : (0717) 439335 , Fax : (0717) 439336

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran,



H. FERY INSANI

NIP. 19700620 199903 1 009

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	IV
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	V
RINGKASAN	6
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
II. NERACA	
III. LAPORAN OPERASIONAL	
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	12
A. PENJELASAN UMUM.....	12
A. 1. DASAR HUKUM.....	12
A. 2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS.....	13
A. 3. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO	14
A. 4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	15
A. 5. BASIS AKUNTANSI	15
A. 6. DASAR PENGUKURAN.....	16
A. 7. KEBIJAKAN AKUNTANSI	16
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	21
B. 1. PENDAPATAN.....	21
B. 2. BELANJA	21
B. 3. BELANJA PEGAWAI	21
B. 4. BELANJA BARANG	22
B. 5. BELANJA MODAL.....	23
B. 6. CATATAN PENTING LAINNYA	23
C. PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN NERACA.....	24
C. 1. KAS BENDAHARA PENGELUARAN	24
C. 2. PERSEDIAAN.....	24
C. 3. TANAH.....	24
C. 4. PERALATAN DAN MESIN.....	24
C. 5. GEDUNG DAN BANGUNAN.....	25
C. 6. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	25

C. 7.	ASET TETAP LAINNYA.....	26
C. 8.	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP.....	26
C. 9.	ASET LAIN-LAIN.....	26
C. 10.	EKUITAS Error! Bookmark not defined.	27
D.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	28
D. 1.	PENDAPATAN - LO	28
D. 2.	BEBAN PEGAWAI.....	28
D. 3.	BEBAN PERSEDIAAN	29
D. 4.	BEBAN JASA	29
D. 5.	BEBAN PEMELIHARAAN	29
D. 6.	BEBAN PERJALANAN DINAS	29
D. 7.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI.....	29
D. 8.	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL.....	30
D. 9.	POS LUAR BIASA.....	30
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	31
E. 1.	EKUITAS AWAL	31
E. 2.	SURPLUS (DEFISIT) LO	31
E. 3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI /KESALAHAN MENDASAR.....	31
E. 4.	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN.....	31
E. 5.	EKUITAS AKHIR	31
F.	PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	32
F. 1.	REKENING PEMERINTAH.....	32
F. 2.	STRUKTUR PEJABAT PERBENDAHARAAN.....	32

Tabel 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019	21
Tabel 2 Rincian Belanja Pegawai per 31 Desember 2019	22
Tabel 3 Rincian Belanja Barang per 31 Desember 2019	23
Tabel 4 Rincian Modal per 31 Desember 2019	23
Tabel 5 Rincian Persediaan per 31 Desember 2019	24
Tabel 6 Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019	25
Tabel 7 Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019	25
Tabel 8 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019	25
Tabel 9 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019	26
Tabel 10 Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019	27
Tabel 11 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2019	28
Tabel 12 Rincian Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019	30
Tabel 13 Struktur Pejabat Perbendaharaan	32



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH

Komplek Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, Kelurahan Air Itam

☎/☎ (0717) 439333- 439336 Fax. (0717) 439335

PANGKALPINANG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (LO); (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran,



H. FERDIANSANI

Penyelia Utama Madya

NIP. 19700620 199903 1 009

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp19.569.029.451,23 atau mencapai 87,61% dari alokasi anggaran sebesar Rp22.336.509.650,00 berupa Belanja Operasi sebesar Rp18.598.216.708,00 atau mencapai 87,15% dari alokasi anggaran sebesar Rp21.341.509.650,00. Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp970.812.743,23 atau mencapai 97,57% dari alokasi anggaran sebesar Rp995.000.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp11.912.972.543,23 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.417.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp10.854.734.203,23; Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.056.821.340,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp11.912.972.543,23.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp19.597.117.488,00 sehingga mengalami Defisit-LO sebesar (Rp19.597.117.488,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 02 Januari 2019 adalah sebesar Rp11.705.753.940,00 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp19.597.117.488,00) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp19.369.135.641,23 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp11.477.772.093,23.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 Dan 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
BELANJA	22.336.509.650,00	19.569.029.451,23	87,61	17.043.459.079,00
BELANJA OPERASI	21.341.509.650,00	18.598.216.708,00	87,15	16.483.147.079,00
Belanja Pegawai	11.510.988.450,00	10.850.517.634,00	94,26	9.396.595.198,00
Belanja Barang	9.830.521.200,00	7.747.699.074,00	78,81	7.086.551.881,00
BELANJA MODAL	995.000.000,00	970.812.743,23	97,57	560.312.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	365.500.000,00	349.100.000,00	95,51	560.312.000,00
Belanja Bangunan dan Gedung	192.500.000,00	190.000.000,00	98,70	0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	60.000.000,00	56.750.000,00	94,58	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	377.000.000,00	374.962.743,23	99,46	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(22.336.509.650,00)	(19.569.029.451,23)	87,61	(17.043.459.079,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(22.336.509.650,00)	(19.569.029.451,23)	87,61	(17.043.459.079,00)

II. NERACA

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

N E R A C A

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 Dan 31 Desember 2018

URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	1.417.000,00	2.390.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	1.417.000,00	2.390.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	35.247.769,00	35.247.769,00
Peralatan dan Mesin	5.693.724.423,00	6.196.385.423,00
Gedung dan Bangunan	6.322.505.343,23	5.946.011.600,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.213.339.900,00	4.156.589.900,00
Aset Tetap Lainnya	3.312.741.420,00	3.312.741.420,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(8.722.824.652,00)	(8.701.809.512,00)
JUMLAH ASET TETAP	10.854.734.203,23	10.945.166.600,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	1.056.821.340,00	1.056.821.340,00
JUMLAH ASET LAINNYA	1.056.821.340,00	1.056.821.340,00
JUMLAH ASET	11.912.972.543,23	12.004.377.940,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	435.200.450,00	298.624.000,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	435.200.450,00	298.624.000,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	435.200.450,00	298.624.000,00
EKUITAS		
EKUITAS	11.477.772.093,23	11.705.753.940,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	11.912.972.543,23	12.004.377.940,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN	19.597.117.488,00	17.801.043.365,00	1.796.074.123,00	10,09
Beban Pegawai - LO	10.841.794.084,00	9.238.092.198,00	1.603.701.886,00	17,36
Beban Persediaan	1.650.180.050,00	1.699.266.350,00	(49.086.300,00)	(2,89)
Beban Jasa	2.475.586.664,00	2.423.574.460,00	52.012.204,00	2,15
Beban Pemeliharaan	520.391.060,00	831.164.500,00	(310.773.440,00)	(37,39)
Beban Perjalanan Dinas	3.247.814.300,00	2.630.822.571,00	616.991.729,00	23,45
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	861.351.330,00	978.123.286,00	(116.771.956,00)	(11,94)
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(19.597.117.488,00)	(17.801.043.365,00)	(1.796.074.123,00)	10,09
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	22.300.000,00	(22.300.000,00)	(100,00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(22.300.000,00)	22.300.000,00	(100,00)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(19.597.117.488,00)	(17.823.343.365,00)	(1.773.774.123,00)	9,95
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(19.597.117.488,00)	(17.823.343.365,00)	(1.773.774.123,00)	9,95

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 Dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	11.705.753.940,00	12.493.913.226,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(19.597.117.488,00)	(17.823.343.365,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Perubahan Nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Persediaan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Dampak akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Tanah	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	(523.490.000,00)
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Atas Perubahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	840.336.190,00	519.865.000,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Lainnya	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Piutang	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Utang	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai penyisihan piutang	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Penyusutan Aset Lain Lain	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(1.040.230.000,00)	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	19.569.029.451,23	17.038.809.079,00
EKUITAS AKHIR	11.477.772.093,23	11.705.753.940,00

A. PENJELASAN UMUM

A. 1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

A. 2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA DAN LITBANG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan:

- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

▪ Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

▪ **Tugas Pokok**

Badan Perencanaan Pembangunan dan penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

▪ **Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Pengoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Gubernur sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya.

▪ **Visi dan Misi**

Visi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah terwujudnya badan perencana yang andal, akuntabel dan partisipatif dalam mendukung pembangunan daerah.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Bappeda dan Litbang memiliki misi:

1. Mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan berbasis data, informasi dan pengetahuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah;
2. Mengembangkan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para pemangku kepentingan;
3. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

A. 3. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

Kebijakan keuangan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta

untuk menjadi pedoman teknis dalam mewujudkan sistem akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual, maka kebijakan keuangan juga mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pedoman administrasi Keuangan Daerah Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencakup:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban
- f. Pengawasan Keuangan Daerah

A. 4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Program aplikasi SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A. 5. BASIS AKUNTANSI

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada

saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A. 6. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A. 7. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 menggunakan basis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2019.

Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan:

1. Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

2. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas atau pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan aturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Kebijakan pengakuan Beban adalah sebagai berikut:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

5. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Aset Lancar

a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

1. Diharapkan segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
2. Berupa kas dan setara kas.

b. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek piutang dan persediaan.

c. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
 2. Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah; dan
 3. Uang tunai di bendahara umum daerah.
- e. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- f. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

B. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap sebagai berikut:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

C. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

6. Kewajiban

Kewajiban atau utang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu.

Kewajiban diklasifikasikan sebagai :

- a. Kewajiban Jangka Pendek
- b. Kewajiban Jangka Panjang

7. Ekuitas

1. Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.
2. RK PPKD merupakan rekening yang berfungsi untuk menampung transaksi yang terjadi antara PD dan PPKD dan transaksi antara PD dengan pihak ketiga yang dibiayai oleh Kas Daerah (BUD).

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B. 1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%.

B. 2. BELANJA

Realisasi Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp19.569.029.451,23 atau 87,61% dari anggaran belanja sebesar Rp22.336.509.650,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
BELANJA	22.336.509.650,00	19.569.029.451,23	87,61
BELANJA OPERASI	21.341.509.650,00	18.598.216.708,00	87,15
Belanja Pegawai	11.510.988.450,00	10.850.517.634,00	94,26
Belanja Barang	9.830.521.200,00	7.747.699.074,00	78,81
BELANJA MODAL	995.000.000,00	970.812.743,23	97,57
Belanja Peralatan dan Mesin	365.500.000,00	349.100.000,00	95,51
Belanja Bangunan dan Gedung	192.500.000,00	190.000.000,00	98,70
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	60.000.000,00	56.750.000,00	94,58
Belanja Aset Tetap Lainnya	377.000.000,00	374.962.743,23	99,46

B. 3. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.850.517.634,00 atau 94,26% dari pagu anggaran sebesar Rp11.510.988.450,00. Rincian belanja pegawai Per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rincian Belanja Pegawai Per 31 Desember 2019

Kode Rekening Buku Besar : 5.1.1
 Name Rekening Buku Besar : Belanja Pegawai
 Pagu APBD : 11.657.079.540,00
 Pagu Perubahan APBD : 10.831.738.450,00

No	TANGGAL	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
1	02-Jan-2019	Gaji Januari 2019	303.143.171,00		303.143.171,00
2	11-Jan-2019	TPP dan UM Desember 2018	298.624.000,00		601.767.171,00
3	31-Jan-2019	Gaji Februari 2019	300.342.795,00		902.109.966,00
4	21-Feb-2019	TPP Januari 2019	402.627.600,00		1.304.737.566,00
5	28-Feb-2019	Gaji Maret 2019	308.109.982,00		1.612.847.548,00
6	06-Mar-2019	TPP Februari 2019	409.991.600,00		2.022.839.148,00
7	29-Mar-2019	Gaji April 2019	311.815.730,00		2.334.654.878,00
8	01-Apr-2019	Rapel Kenaikan Gaji	37.767.081,00		2.372.421.959,00
9	08-Apr-2019	TPP Maret 2019	410.309.700,00		2.782.731.659,00
10	30-Apr-2019	Gaji Mei 2019	318.214.777,00		3.100.946.436,00
11	07-Mei-2019	Kekurangan TPP Maret 2019	750.000,00		3.101.696.436,00
12	10-Mei-2019	TPP April 2019	421.311.950,00		3.523.008.386,00
13	23-Mei-2019	THR	287.383.746,00		3.810.392.132,00
14	24-Mei-2019	TPP THR	418.556.400,00		4.228.948.532,00
15	31-Mei-2019	Gaji Juni 2019	312.103.079,00		4.541.051.611,00
16	11-Jun-2019	TPP Mei 2019	418.556.400,00		4.959.608.011,00
17	12-Jun-2019	Kekurangan TPP Mei 2019	4.902.000,00		4.964.510.011,00
18	28-Jun-2019	Gaji Juli 2019	316.084.187,00		5.280.594.198,00
19	01-Jul-2019	Gaji 13, TPP Juni 2019, TPP 13	1.135.358.275,00		6.415.952.473,00
20	02-Jul-2019	Kekurangan TPP 13	4.350.000,00		6.420.302.473,00
21	31-Jul-2019	Gaji Agustus 2019	322.367.864,00		6.742.670.337,00
22	05-Agust-2019	TPP Juli 2019	432.122.100,00		7.174.792.437,00
23	30-Agust-2019	Gaji September 2019	313.300.659,00		7.488.093.096,00
24	04-Sep-2019	TPP Agustus 2019	425.207.000,00		7.913.300.096,00
25	30-Sep-2019	Gaji Oktober 2019	313.689.301,00		8.226.989.397,00
26	03-Okt-2019	TPP September 2019	434.385.800,00		8.661.375.197,00
27	31-Okt-2019	Gaji Nopember 2019	320.706.496,00		8.982.081.693,00
28	05-Nop-2019	TPP Oktober 2019	439.017.000,00		9.421.098.693,00
29	29-Nop-2019	Gaji Desember 2019	319.664.741,00		9.740.763.434,00
30	04-Des-2019	TPP Nopember 2019	436.454.200,00		10.177.217.634,00

Kode Rekening Buku Besar : 5.2.1
 Name Rekening Buku Besar : Belanja Pegawai
 Pagu APBD : 473.000.000,00
 Pagu Perubahan APBD : 679.250.000,00

No	TANGGAL	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
1	22-Apr-2019	Honorarium Tim Kegiatan	30.000.000,00		30.000.000,00
2	07-Mei-2019	Honorarium Tim Kegiatan	30.000.000,00		60.000.000,00
3	24-Mei-2019	Honorarium Tim Kegiatan	30.000.000,00		90.000.000,00
4	24-Jul-2019	Honorarium Tim Kegiatan	30.000.000,00		120.000.000,00
5	16-Agust-2019	Honorarium Tim Kegiatan	30.000.000,00		150.000.000,00
6	02-Sep-2019	Honorarium Tim Kegiatan	30.000.000,00		180.000.000,00
7	24-Sep-2019	Honorarium Tim Kegiatan	30.000.000,00		210.000.000,00
8	03-Okt-2019	Honorarium Tim Kegiatan	30.000.000,00		240.000.000,00
9	09-Okt-2019	Gaji Pegawai Tidak tetap	78.300.000,00		318.300.000,00
10	22-Okt-2019	Gaji Pegawai Tidak tetap	78.300.000,00		396.600.000,00
11	13-Nop-2019	Gaji Pegawai Tidak tetap	78.300.000,00		474.900.000,00
12	03-Des-2019	Gaji Pegawai Tidak tetap	76.650.000,00		551.550.000,00
13	05-Des-2019	Honorarium Tim Kegiatan	90.000.000,00		641.550.000,00
14	31-Des-2019	Honorarium Tim Kegiatan	31.750.000,00		673.300.000,00

B. 4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.747.699.074,00 atau 78,81% dari pagu anggaran sebesar Rp9.830.521.200,00. Rincian belanja barang Per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Belanja Barang Per 31 Desember 2019

TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
21-Mar-2019	957/0541/GU/BL/2019	685.793.598,00		685.793.598,00
30-Apr-2019	957/1221/GU/BL/2019	738.170.756,00		1.423.964.354,00
11-Jun-2019	957/1893/GU/BL/2019	705.903.187,00		2.129.867.541,00
19-Jun-2019	Kontrapos		750.000,00	2.129.117.541,00
24-Jul-2019	957/2574/GU/BL/2019 dan 957/2571/LS/BL/2019	792.474.160,00		2.921.591.701,00
21-Agust-2019	957/3066/LS/BL/2019	194.000.000,00		3.115.591.701,00
02-Sep-2019	957/3213/GU/BL/2019	700.068.634,00		3.815.660.335,00
10-Okt-2019	957/3874/GU/BL/2019	665.953.600,00		4.481.613.935,00
30-Okt-2019	957/4163/GU/BL/2019 dan 957/4162/LS/BL/2019	683.682.864,00		5.165.296.799,00
13-Nop-2019	957/4562/LS/BL/2019	135.460.000,00		5.300.756.799,00
25-Nop-2019	957/4765/GU/BL/2019	719.576.096,00		6.020.332.895,00
29-Nop-2019	Kontrapos		155.000,00	6.020.177.895,00
09-Des-2019	957/5322/GU/BL/2019	741.418.741,00		6.761.596.636,00
17-Des-2019	957/5652/GU/BL/2019	521.001.494,00		7.282.598.130,00
31-Des-2019	GU Nihil	465.100.944,00		7.747.699.074,00

B. 5. BELANJA MODAL

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2019 sebesar Rp970.812.743,23 atau 97,57% dari pagu anggaran sebesar Rp995.000.000,00.

Tabel 4
Rincian Belanja Modal Per 31 Desember 2019

No	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1	10-Sep-2019	957/3363/LS/BL/2019	186.493.743,23		186.493.743,23
2	28-Okt-2019	957/4078/LS/BL/2019	188.469.000,00		374.962.743,23
3	11-Nop-2019	957/4509/LS/BL/2019 dan 957/4510/LS/BL/2019	166.700.000,00		541.662.743,23
4	14-Nop-2019	957/4570/LS/BL/2019	128.225.000,00		669.887.743,23
5	25-Nop-2019	957/4764/LS/BL/2019	56.750.000,00		726.637.743,23
6	02-Des-2019	957/5096/LS/BL/2019	54.175.000,00		780.812.743,23
7	17-Des-2019	957/5669/LS/BL/2019	190.000.000,00		970.812.743,23

B. 6. CATATAN PENTING LAINNYA

Pada tanggal 19 Juni 2019 terdapat pengembalian belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pelayanan administrasi perkantoran no.kuitansi 0040 tanggal 10 April 2019 SPPD ke Belitung a.n Joko Triadhi sebesar Rp750.000,00 dan pengembalian belanja jasa servis kendaraan dinas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur BASTB No: 01.BM/BASTB/BAPPEDA-I/2019 tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp155.000,00 sehingga mengurangi belanja barang dan jasa tahun 2019.

E. PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN NERACA

C. 1. KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00.

C. 2. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.417.000,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Persediaan per 31 Desember 2019

Kertas HVS F4 70 Gram	Dus		Rp 265.000	-	9	2.385.000	8	2.120.000	1	265.000
Isi Straples no 10	kotak		Rp 45.000	-	20	900.000	16	720.000	4	180.000
Binder klip 107	Kotak		Rp 25.000	-	26	650.000	24	600.000	2	50.000
Binder klip 260	Kotak		Rp 8.500	-	25	212.500	21	178.500	4	34.000
Binder klip 111	Kotak		Rp 12.000	-	28	336.000	24	288.000	4	48.000
Binder klip 155	Kotak		Rp 35.000	-	25	875.000	22	770.000	3	105.000
Binder klip 200	Kotak		Rp 20.000	-	26	520.000	22	440.000	4	80.000
Paper Klip Joyko No 5	Kotak		Rp 5.000	-	30	150.000	25	125.000	5	25.000
Paper Klip Joyko No 3	Kotak		Rp 6.000	-	30	180.000	25	150.000	5	30.000
Cetak Map Bappeda Prov.Babel	Lembar	100	Rp 12.000	1.200.000		-	50	600.000	50	600.000

C. 3. TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp35.247.769,00.

C. 4. PERALATAN DAN MESIN

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.693.724.423,00. Nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019

Bidang Barang	NERACA				Saldo Akhir Per 31 Des. 2019
	NERACA (Per 31 Des.2018)	Mutasi Perubahan s/d 31 Desember 2019		6 (3+5)-(4)	
		Berkurang	Bertambah		
2	3	4	5		
Peralatan & Mesin	Rp 6.196.385.423,00	Rp 1.040.230.000,00	Rp 537.569.000,00	Rp 5.693.724.423,00	
Alat-alat besar	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Alat-alat Angkutan	Rp 1.706.370.000,00	Rp 1.040.230.000,00	Rp -	Rp 666.140.000,00	
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 16.600.000,00	Rp -	Rp -	Rp 16.600.000,00	
Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 4.052.770.423,00	Rp -	Rp 520.882.000,00	Rp 4.573.652.423,00	
Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 404.170.000,00	Rp -	Rp 16.687.000,00	Rp 420.857.000,00	
Alat-alat Kedokteran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Alat-alat Laboratorium	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Alat-alat Keamanan	Rp 16.475.000,00	Rp -	Rp -	Rp 16.475.000,00	

C. 5. GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.322.505.343,23.

Tabel 7
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019

Bidang Barang	NERACA				Saldo Akhir Per 31 Des. 2019
	NERACA (Per 31 Des.2018)	Mutasi Perubahan s/d 31 Desember 2019		6 (3+5)-(4)	
		Berkurang	Bertambah		
2	3	4	5		
Gedung dan Bangunan	Rp 5.946.011.600,00	Rp -	Rp 376.493.743,23	Rp 6.322.505.343,23	
Bangunan Gedung	Rp 5.946.011.600,00	Rp -	Rp 376.493.743,23	Rp 6.322.505.343,23	
Bangunan Menumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

C. 6. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.213.339.900,00.

Tabel 8
Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019

Bidang Barang	NERACA				Saldo Akhir Per 31 Des. 2019
	NERACA (Per 31 Des.2018)	Mutasi Perubahan s/d 31 Desember 2019		6 (3+5)-(4)	
		Berkurang	Bertambah		
2	3	4	5		
Jalan, Irigasi & Jaringan	Rp 4.156.589.900,00	Rp -	Rp 56.750.000,00	Rp 4.213.339.900,00	
Jalan dan Jembatan	Rp 33.330.000,00	Rp -	Rp -	Rp 33.330.000,00	
Bangunan Air/Irigasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Instalasi	Rp -	Rp -	Rp 56.750.000,00	Rp 56.750.000,00	
Jaringan	Rp 4.123.259.900,00	Rp -	Rp -	Rp 4.123.259.900,00	

C. 7. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.312.741.420,00.

C. 8. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp8.722.824.652,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	5.693.724.423	4.026.795.645	1.666.928.778
2	Gedung dan Bangunan	6.322.505.343	1.687.147.989	4.635.357.354
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.213.339.900	3.008.881.018	1.204.458.882
	Jumlah	16.229.569.666	8.722.824.652	7.506.745.014

C. 9. ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.056.821.340,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Tabel 10
Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	127	1.056.821.340,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	101	832.454.340,00
	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	4.600.000,00
	- Mesin Absen (Time Recorder)	1	15.925.000,00
	- Mesin Foto Copy dengan kertas biasa folio	2	72.130.000,00
	- Lemari Besi	2	3.990.000,00
	- Filling Besi/Metal	1	1.640.000,00
	- Meja Rapat	2	2.930.000,00
	- Kursi Tamu	2	3.620.000,00
	- Gordyn	9	18.595.000,00
	- AC Split	9	46.650.000,00
	- Dispenser	1	1.013.800,00
	- Unit Power Supply	6	25.800.000,00
	- Dispenser	1	1.400.000,00
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	15	219.662.040,00
	- Lampu Sorot	2	2.460.000,00
	- P.C Unit/ Komputer PC	6	85.736.000,00
	- Lap Top	10	145.789.500,00
	- Personal Komputer Lain-lain	1	6.975.000,00
	- Printer	15	23.990.000,00
	- Scanner	1	18.000.000,00
	- Digitzer	1	15.000.000,00
	- Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2	99.513.000,00
	- UPS	2	5.520.000,00
	- Webcam	2	3.000.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	2.725.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1.370.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2.250.000,00
	- Lemari Buku untuk Perpustakaan	2	2.170.000,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	26	224.367.000,00
	- Proyektor + Attachment	5	79.800.000,00
	- Chairman/Audio Conference	1	97.082.000,00
	- Handy cam	1	8.350.000,00
	- Layar Proyektor	1	1.500.000,00
	- Camera Electronic	2	15.440.000,00
	- Telephone (PABX)	15	20.625.000,00
	- Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain	1	1.570.000,00
	TOTAL	127	1.056.821.340,00

C. 10. KEWAJIBAN

Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp435.200.450,00 merupakan utang beban yaitu utang tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bulan Desember 2019.

C. 11. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.477.772.093,23. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D. 1. PENDAPATAN - LO

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00.

D. 2. BEBAN PEGAWAI - LO

Jumlah Beban Pegawai – LO pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.841.794.084,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian beban pegawai - LO per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Beban Pegawai - LO per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	TANGGAL	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
1	02-Jan-2019	Jurnal Balik Utang Beban 2018		298.624.000,00	(298.624.000,00)
2	02-Jan-2019	Gaji Januari 2019	303.143.171,00		4.519.171,00
3	10-Jan-2019	Gaji Honorer Januari 2019	57.200.000,00		61.719.171,00
4	10-Jan-2019	TPP dan UM Desember 2018	298.624.000,00		360.343.171,00
5	31-Jan-2019	Gaji Februari 2019	300.342.795,00		660.685.966,00
6	01-Feb-2019	Gaji Honorer Februari 2019	57.200.000,00		717.885.966,00
7	21-Feb-2019	TPP Januari 2019	402.627.600,00		1.120.513.566,00
8	28-Feb-2019	Gaji Maret 2019	308.109.982,00		1.428.623.548,00
9	01-Mar-2019	Gaji Honorer Maret 2019	57.200.000,00		1.485.823.548,00
10	05-Mar-2019	TPP Februari 2019	409.991.600,00		1.895.815.148,00
11	29-Mar-2019	Gaji April 2019	349.582.811,00		2.245.397.959,00
12	01-Apr-2019	Gaji Honorer April 2019	57.200.000,00		2.302.597.959,00
13	04-Apr-2019	TPP Maret 2019	410.309.700,00		2.712.907.659,00
14	30-Apr-2019	Gaji Mei 2019	318.214.777,00		3.031.122.436,00
15	02-Mei-2019	Gaji Honorer Mei 2019	57.200.000,00		3.088.322.436,00
16	06-Mei-2019	Rapel Gaji Honorer April-Mei 2019	4.400.000,00		3.092.722.436,00
17	06-Mei-2019	TPP April 2019	422.061.950,00		3.514.784.386,00
18	23-Mei-2019	THR bulan Mei 2019	287.383.746,00		3.802.168.132,00
19	24-Mei-2019	Gaji 13 Honorer	59.400.000,00		3.861.568.132,00
20	24-Mei-2019	TPP THR bulan Mei 2019	418.556.400,00		4.280.124.532,00
21	29-Mei-2019	Gaji Juni 2019	312.103.079,00		4.592.227.611,00
22	10-Jun-2019	Gaji Honorer Juni 2019	59.400.000,00		4.651.627.611,00
23	10-Jun-2019	TPP Mei 2019	418.556.400,00		5.070.184.011,00
24	12-Jun-2019	Kekurangan TPP Mei 2019	4.902.000,00		5.075.086.011,00
25	28-Jun-2019	Gaji Juli 2019	316.084.187,00		5.391.170.198,00

26	01-Jul-2019	gaji 13, TPP Juni, TPP 13, Kekurangan TPP 13	1.139.708.275,00	6.530.878.473,00
27		Gaji Honorer Juli 2019	59.400.000,00	6.590.278.473,00
28	31-Jul-2019	Gaji Agustus 2019	322.367.864,00	6.912.646.337,00
29	01-Agust-2019	Gaji Honorer Agustus 2019	59.400.000,00	6.972.046.337,00
30	05-Agust-2019	TPP Juli 2019	432.122.100,00	7.404.168.437,00
31	30-Agust-2019	Gaji September 2019	313.300.659,00	7.717.469.096,00
32	04-Sep-2019	TPP Agustus 2019	425.207.000,00	8.142.676.096,00
33	30-Sep-2019	Gaji Oktober 2019	313.689.301,00	8.456.365.397,00
34	03-Okt-2019	TPP September 2019	434.385.800,00	8.890.751.197,00
35	31-Okt-2019	Gaji Nopember 2019	320.706.496,00	9.211.457.693,00
36	04-Nop-2019	TPP Oktober 2019	439.017.000,00	9.650.474.693,00
37	29-Nop-2019	Gaji Desember 2019	319.664.741,00	9.970.139.434,00
38	03-Des-2019	TPP Nopember 2019	436.454.200,00	10.406.593.634,00
39	31-Des-2019	Utang TPP Desember 2019	435.200.450,00	10.841.794.084,00

D. 3. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.650.180.050,00.

D. 4. BEBAN JASA

Jumlah Beban Jasa pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.475.586.664,00.

D. 5. BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp520.391.060,00.

D. 6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.247.814.300,00.

D. 7. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp861.351.330,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (F)	Penyusutan (F)
1	Peralatan dan Mesin	Rp 5.693.724.423	Rp 545.284.082
2	Gedung dan bangunan	Rp 6.322.505.343	Rp 120.480.191
3	Jalan, Irigasi dan jaringan	Rp 4.213.339.900	Rp 195.587.057
Jumlah		Rp 16.229.569.666	Rp 861.351.330

D. 8. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

D. 9. POS LUAR BIASA

Jumlah Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E. 1. EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas awal tahun 2019 adalah sebesar Rp11.705.753.940,00.

E. 2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp19.597.117.488,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E. 3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI /KESALAHAN MENDASAR

E. 3. 1. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang muncul periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp840.336.190,00. Nilai pengurangan penyusutan ini muncul diakibatkan dari nilai penyusutan kendaraan dinas yang dipindahtanggankan ke pengelola.

E. 3. 2. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya yang muncul periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp1.040.230.000,00). Nilai ini muncul diakibatkan dari pengurangan aset tetap akibat alih status penggunaan.

E. 4. KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Nilai Kewajiban untuk Dikonsolidasikan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp19.569.029.451,23.

E. 5. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.477.772.093,23.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F. 1. REKENING PEMERINTAH

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 1 (satu) buah rekening. Rekening tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor : 188.44/1407/BAKUDA/2017 tanggal 29 Desember 2017. Adapun rincian rekening tersebut :

- Rekening Bank Sumsel Babel dengan nomor 144-301-0110 atas nama Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

F. 2. STRUKTUR PEJABAT PERBENDAHARAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor 188.44/1057/BAKUDA/2018 tanggal 28 Desember 2018, struktur pejabat perbendaharaan pada tahun anggaran 2019 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 13

Struktur Pejabat Perbendaharaan

Jabatan Perbendaharaan	Nama Pejabat Perbendaharaan
Pengguna Anggaran	H. FERY INSANI
Pejabat yang Mewakili Penandatanganan SPM	Dr. JOKO TRIADHI, SE, M.Si
Bendahara Pengeluaran	LUSI VERONICA, SE
Bendahara Penerimaan	DINNI ELVERA, A.Md



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Pemerintahan : 4.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi : 4.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
2	BELANJA	22.336.509.650,00	19.569.029.451,23	87,61	17.043.459.079,00
2.1	BELANJA OPERASI	21.341.509.650,00	18.598.216.708,00	87,15	16.483.147.079,00
2.1.1	Belanja Pegawai	11.510.988.450,00	10.850.517.634,00	94,26	9.396.595.198,00
2.1.2	Belanja Barang	9.830.521.200,00	7.747.699.074,00	78,81	7.086.551.881,00
2.2	BELANJA MODAL	995.000.000,00	970.812.743,23	97,57	560.312.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	365.500.000,00	349.100.000,00	95,51	560.312.000,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	192.500.000,00	190.000.000,00	98,70	0,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	60.000.000,00	56.750.000,00	94,58	0,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	377.000.000,00	374.962.743,23	99,46	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.336.509.650,00)	(19.569.029.451,23)	87,61	(17.043.459.079,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(22.336.509.650,00)	(19.569.029.451,23)	87,61	(17.043.459.079,00)

Pangkalpinang, 1 Januari 2019

Kepala Badan



H. FERY INSANI

NIP. 19700620 199903 1 009



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

Per 31 December 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	1.417.000,00	2.390.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	1.417.000,00	2.390.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	35.247.769,00	35.247.769,00
Peralatan dan Mesin	5.693.724.423,00	6.196.385.423,00
Gedung dan Bangunan	6.322.505.343,23	5.946.011.600,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.213.339.900,00	4.156.589.900,00
Aset Tetap Lainnya	3.312.741.420,00	3.312.741.420,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(8.722.824.652,00)	(8.701.809.512,00)
JUMLAH ASET TETAP	10.854.734.203,23	10.945.166.600,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	1.056.821.340,00	1.056.821.340,00

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 4 . 01 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 01 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

URAIAN	2019	2018
JUMLAH ASET LAINNYA	1.056.821.340,00	1.056.821.340,00
JUMLAH ASET	11.912.972.543,23	12.004.377.940,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	435.200.450,00	298.624.000,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	435.200.450,00	298.624.000,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	435.200.450,00	298.624.000,00
EKUITAS		
EKUITAS	11.477.772.093,23	11.705.753.940,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	11.912.972.543,23	12.004.377.940,00



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan	: 4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Pemerintahan	: 4.01	PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 4.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 4.01.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	19.597.117.488,00	17.801.043.365,00	1.796.074.123,00	10,09
9.1.1	Beban Pegawai - LO	10.841.794.084,00	9.238.092.198,00	1.603.701.886,00	17,36
9.1.2	Beban Persediaan	1.650.180.050,00	1.699.266.350,00	(49.086.300,00)	(2,89)
9.1.2	Beban Jasa	2.475.586.664,00	2.423.574.460,00	52.012.204,00	2,15
9.1.2	Beban Pemeliharaan	520.391.060,00	831.164.500,00	(310.773.440,00)	(37,39)
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	3.247.814.300,00	2.630.822.571,00	616.991.729,00	23,45
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	861.351.330,00	978.123.286,00	(116.771.956,00)	(11,94)

Urusan Pemerintahan : 4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Pemerintahan : 4.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi : 4.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(19.597.117.488,00)	(17.801.043.365,00)	(1.796.074.123,00)	10,09
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	22.300.000,00	(22.300.000,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(22.300.000,00)	22.300.000,00	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(19.597.117.488,00)	(17.823.343.365,00)	(1.773.774.123,00)	9,95
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(19.597.117.488,00)	(17.823.343.365,00)	(1.773.774.123,00)	9,95

Urusan Pemerintahan : 4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Pemerintahan : 4.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi : 4.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
----------	--------	---------------	---------------	--------------------------	-----

Pangkalpinang, 1 Januari 2019

Kepala Badan



H. FERY INSANI

NIP. 19700620 199903 1 009



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 4 . 01 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 01 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	11.705.753.940,00	12.493.913.226,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(19.597.117.488,00)	(17.823.343.365,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Perubahan Nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daer.	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Persediaan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Dampak akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Tanah	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	(523.490.000,00)
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Atas Perubahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	840.336.190,00	519.865.000,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Lainnya	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	0,00	17.038.809.079,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Piutang	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Utang	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai penyisihan piutang	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Penyusutan Aset Lain Lain	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(1.040.230.000,00)	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	19.569.029.451,23	0,00
EKUITAS AKHIR	11.477.772.093,23	11.705.753.940,00

Pangkalpinang, 31 Desember 2019

Kepala Badan



H. FERY INSANI

NIP. 19700620 199903 1 009